

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

Pada bab ini diuraikan tinjauan pustaka yang menjadikan kerangka pemikiran dari pengajuan dalam hipotesis. Pada bab ini hal-hal yang disajikan mencakup dari tinjauan yang menjelaskan pada konsep dari variabel yang akan diteliti serta pembahasan tentang penelitian yang terdahulu, kerangka berpikir juga akan ditulis dan dijelaskan pada bab ini, kerangka berpikir ini ditulis untuk dapat menjelaskan seperti apa model dan hubungan variabel bebas dengan variabel terikat. Bahasan terakhir pada bab ini adalah hipotesis yang diajukan oleh peneliti.

2.1.1 Kemiskinan

2.1.1.1 Definisi Kemiskinan

Menurut Kuncoro (1997:103) dalam (Sugiyono & Prasetyawati, 2020), kemiskinan merupakan ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum atau ketimpangan antara pendapatan dan pengeluaran. Kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi tersebut meliputi pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan.

Menurut Suparlan (1984) dalam (Dharmmayukti et al., 2021), kemiskinan merupakan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah yaitu adanya tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Adapun menurut para ahli dalam (Arsyad, 2010:299), kemiskinan itu bersifat multidimensional. Artinya, karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinan pun memiliki banyak aspek. Dilihat dari kebijakan umum, maka kemiskinan meliputi dua aspek yaitu aspek primer yang berupa miskin akan aset, organisasi sosial politik, pengetahuan serta keterampilan. Dan aspek sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan serta informasi. Dimensi ini terealisasi dalam bentuk kekurangan gizi, air, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah.

Dari beberapa pengertian dari kemiskinan tersebut disimpulkan bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan persentase penduduk miskin atau *Head Count Index (HCI-P0)* adalah persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan. Garis kemiskinan yaitu minimum untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara

Cara untuk mengetahui persentase penduduk miskin adalah dengan rumusnya yaitu:

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

Keterangan:

P_{α} : 0

z : Garis Kemiskinan

y_i : Rata-rata pendapatan per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

q : Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

n : Jumlah penduduk

2.1.1.2 Jenis dan Bentuk kemiskinan

Secara konsep menurut Suryawati (2005), kemiskinan dapat dibagi dalam empat jenis yaitu:

1. Kemiskinan absolut, yaitu bila pendapatannya di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja.
2. Kemiskinan relatif, yaitu kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan.
3. Kemiskinan kultural yaitu mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, dan tidak kreatif meskipun ada bantuan.
4. Kemiskinan struktural yaitu situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan

2.1.1.3 Penyebab kemiskinan

Penyebab kemiskinan menurut Suharto (2005) yaitu:

1. Faktor Individual, terkait dengan aspek patologis, termasuk kondisi fisik dan psikologis individu yang miskin. Orang miskin disebabkan oleh perilaku, pilihan, atau kemampuan dari individu yang miskin itu sendiri dalam menghadapi kehidupan
2. Faktor Sosial, kondisi-kondisi lingkungan sosial yang menjebak seseorang menjadi miskin. Misalnya, diskriminasi berdasarkan usia, gender, etnis yang menyebabkan seseorang menjadi miskin. Termasuk dalam faktor ini adalah kondisi sosial dan ekonomi keluarga individu yang miskin yang biasanya menyebabkan kemiskinan antar generasi
3. Faktor Kultural, kondisi atau kualitas budaya yang menyebabkan kemiskinan. Faktor ini secara khusus sering menunjuk pada konsep kemiskinan kultural atau budaya kemiskinan yang menghubungkan budaya kemiskinan dengan kebiasaan hidup. Penelitian Oscar Lewis di Amerika Latin menemukan bahwa orang miskin memiliki sub-kultur atau kebiasaan tersendiri, yang berbeda dengan masyarakat kebanyakan. Sikap-sikap “negatif” seperti malas, fatalisme atau menyerah pada nasib, tidak memiliki jiwa wirausaha, dan kurang menghormati etos kerja, misalnya, sering ditemukan pada orang-orang miskin
4. Faktor Struktural, berkaitan dengan struktur atau sistem yang tidak adil, tidak sensitif dan tidak *accessible* sehingga menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin. Sebagai contoh, sistem ekonomi neoliberalisme yang diterapkan di Indonesia telah menyebabkan para petani, nelayan, dan pekerja sektor informal terjerat oleh, pajak dan iklim investasi

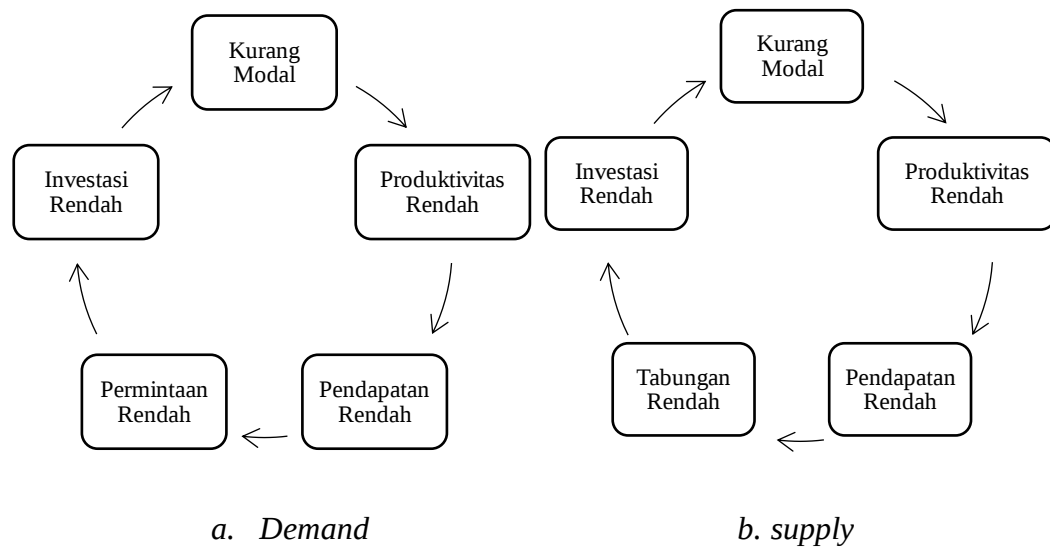
lebih menguntungkan orang kaya dan pemodal asing untuk terus menumpuk kekayaan.

Sementara itu menurut Todaro & Smith (2006) menyebutkan bahwa penyebab kemiskinan yang terjadi pada negara berkembang antara lain:

1. Pendapatan nasional yang rendah dan lambatnya laju pertumbuhan ekonomi.
2. Rendahnya pendapatan per kapita di negara berkembang
3. Distribusi pendapatan diantara penduduk tidak merata
4. Sebagian besar penduduk di negara berkembang berjuang dengan kemiskinan ekstrem
5. Layanan dan infrastruktur kesehatan yang buruk dan tidak memadai menjadi pemicu kekurangan gizi dan berbagai wabah penyakit
6. Infrastruktur dan program pendidikan yang umumnya tidak relevan dan kurang memadai.

2.1.1.4 Teori Kemiskinan

Teori Ragnar Nurkse (1953) dalam Amalia (2022:225), menjelaskan bahwa kegagalan dalam pembangunan yang terjadi di berbagai negara disebabkan karena masyarakat atau negara tersebut terjebak dalam lingkaran setan kemiskinan (*Vicious circle poverty*). Lingkaran setan adalah sekumpulan kekuatan yang berinteraksi dan menciptakan situasi dimana suatu negara, terutama negara berkembang menghadapi banyak kesulitan untuk mencapai pembangunan yang lebih tinggi.



Sumber: Amalia (2022)

Gambar 2.1 Lingkaran Setan Kemiskinan

Menurut Nurkse ada dua lingkaran perangkat kemiskinan yaitu dari segi permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*). Dari sisi permintaan, kemiskinan terjadi karena kurangnya pembentukan modal yang terjadi akibat kurangnya penanaman modal. Dalam negara yang masih tergolong miskin rangsangan untuk melakukan penanaman modal masih rendah hal ini dikarenakan rendahnya daya beli yang dimiliki oleh masyarakat. Hal tersebut berdampak pada kurangnya rangsangan untuk para pengusaha melakukan penanaman modal (investasi) dan rendahnya daya beli yang dimiliki masyarakat tersebut disebabkan masih rendahnya pendapatan riil masyarakat dan hal tersebut disebabkan masih kurangnya produktivitas masyarakat. Untuk memutus lingkaran setan kemiskinan dari sisi demand yaitu dengan meningkatkan pendapatannya. Hal ini akan berdampak kepada permintaan meningkat dan investasi juga meningkat maka modal menjadi efisien. Dengan demikian produktivitas dapat meningkat.

Dari sisi penawaran, kemiskinan terjadi karena adanya tingkat produktivitas masyarakat yang rendah mengakibatkan rendahnya tingkat pendapatan masyarakat sehingga mengakibatkan kemampuan masyarakat untuk menabung juga menjadi rendah kemudian akan terjadi kurangnya penanaman modal yang pada akhirnya akan mengakibatkan suatu negara kekurangan pembentukan modal dan membuat kurangnya barang modal yang akan tetap membuat produktivitas tetap rendah (Fahmi & Hayati, 2024). Untuk memutus lingkaran setan kemiskinan dari sisi supply yaitu dengan meningkatkan produktivitas yang rendah tersebut sehingga penghasilan yang mereka dapat bisa meningkat, dengan meningkatnya penghasilan maka sebagian dari penghasilan tersebut dapat mereka tabung, dengan menabung maka investasi akan meningkat dan modal akan menjadi efisien (tidak boros).

2.1.2 Upah Minimum Provinsi

2.1.2.1 Definisi Upah Minimum

Pengertian upah sebagaimana dirumuskan pada Pasal 30 ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat UU Ketenagakerjaan. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 01 Tahun 1999, yang dimaksud dengan upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Jika dilihat secara mikro, upah ditujukan sebagai pengaman agar upah tidak merosot. Sedangkan secara makro, upah minimum bertujuan untuk pemerataan pendapatan, meningkatkan daya beli pekerja dan pelebaran kesempatan kerja. Ada beberapa indikator yang dapat mempengaruhi besar kecilnya upah seperti permintaan penawaran tenaga kerja, organisasi buruh, kemampuan bayar perusahaan, produktivitas, biaya hidup, pemerintah, keadilan dan kelayakan upah. Kebijakan upah minimum di Indonesia terwujud dalam adanya Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Penetapan upah minimum didasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) mempertimbangkan IHK, Inflasi, serta pertumbuhan ekonomi (Ali Mauludi AC et al., 2023)

Upah Minimum Provinsi (UMP) dapat ditinjau dari tiga sisi, yakni dari sisi pekerja, perusahaan dan pemerintah. Dari sisi pekerja, upah menjadi kewajiban untuk membiayai kebutuhan hidup diri sendiri dan keluarganya. Upah juga menjadi motivasi untuk para pekerja dalam produktivitas pekerjaan mereka. Dari sisi perusahaan, upah menjadi pengurang atas keuntungan yang diperoleh, karena upah merupakan faktor biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dalam proses produksi. Dan dari sisi pemerintah, upah menjadi sarana untuk menciptakan pendapatan yang merata serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.18 tahun 2022 tentang berikut merupakan formulasi untuk menghitung besaran upah minimum provinsi:

a. Rumus Umum:

$$UM(t + 1) = UM(t) + (\text{Nilai Penyesuaian } UM(t+1) \times UM(t))$$

b. Nilai Penyesuaian UMP:

$$\text{Nilai Penyesuaian } UM(t+1) = \text{Inflasi} + (PE \times \alpha)$$

Keterangan:

Um(t+1) : Upah minimum yang akan ditetapkan

Umt : Upah minimum tahun berjalan

Inflasi : Inflasi yang dihitung dari September tahun sebelumnya hingga September tahun berjalan

PE : Pertumbuhan produk domestik bruto harga konstan

α : Indeks tertentu yang mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi, nilainya berkisar antara 0,10 hingga 0,30 dan ditentukan oleh dewan pengupahan setempat

2.1.2. Jenis Jenis Upah

Menurut Zaeni Asyhadie (2019:80) terdapat beberapa jenis upah terdapat beberapa jenis yaitu sebagai berikut:

1. Upah Nominal

Upah nominal merupakan sejumlah uang yang dibayarkan secara tunai kepada pekerja/buruh yang berhak sebagai imbalan atas pengerahan jasa-jasa atau pelayanannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja.

2. Upah Nyata (*real wages*)

Upah nyata adalah yang nyata, yang benar-benar harus diterima seorang pekerja/buruh yang berhak. Upah nyata ini ditentukan oleh daya beli upah tersebut yang akan bergantung dari:

- a. Besar kecilnya jumlah uang yang di terima
- b. Besar atau kecilnya biaya hidup yang diperlukan

3. Upah Hidup

Upah hidup merupakan upah yang diterima pekerja relatif cukup untuk membiayai kebutuhan hidupnya secara luas yang tidak hanya kebutuhan pokok saja, melainkan kebutuhan juga kebutuhan sosial keluarganya, seperti pendidikan, asuransi, rekreasi dan lain-lain.

4. Upah Minimum

Upah minimum merupakan upah terendah yang dijadikan standar oleh perusahaan untuk menentukan upah para pekerja/buruh yang bekerja di perusahaannya. Upah minimum ini umumnya ditentukan setiap tahun oleh pemerintah.

5. Upah Wajar

Upah wajar merupakan upah upah yang relatif dinilai cukup wajar oleh pengusaha dan pekerja/buruh sebagai imbalan atas jasa-jasanya pada perusahaan sebagai imbalan atas jasa-jasanya. Upah wajar ini selalu berubah-ubah sesuai dengan faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut adalah :

- a. Kondisi perekonomian negara
- b. Nilai upah rata-rata di daerah tempat perusahaan itu berada
- c. Peraturan perpajakan
- d. Standar hidup para pekerja/buruh itu sendiri
- e. Posisi perusahaan dilihat dari struktur perekonomian negara.

2.1.2.3 Teori Upah Minimum

Menurut Zaeni Ashyadie (2019:79) ada beberapa teori yang harus diperhatikan sebagai teori dasar untuk menetapkan upah. Teori-teori tersebut adalah sebagai berikut:

a. Teori Upah Normal (David Ricardo)

Menurut teori upah normal, upah ditetapkan dengan berpedoman kepada biaya-biaya yang diperlukan untuk membiayai segala keperluan hidup pekerja atau tenaga kerja. Dengan teori ini ditegaskan kepada pekerja bahwa sejumlah uang yang diterimanya sebagai upah itu adalah sewajarnya demikian besarnya karena memang hanya demikian kemampuan pengusaha.

b. Teori Undang-Undang Upah Besi (Lasalle).

Menurut teori ini, upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh berdasarkan teori upah normal diatas hanya memenangkan pengusaha. Sebab, kalau teori itu yang dipergunakan, mudah saja kemampuannya tanpa berfikir bagaimana sulitnya pekerja/buruh itu. Jadi, harus ditentang.

c. Teori Dana Upah (Stuart Mill Senior)

Menurut teori ini, pekerja/buruh tidak perlu menentang seperti yang dikemukakan oleh teori undang-undang upah besi karena upah yang diterimanya itu sebetulnya berdasarkan pada besar kecilnya jumlah dana yang ada pada masyarakat. Jika dana jumlah besar, maka akan besar pula upah yang akan diterima pekerja/buruh. Sebaliknya, kalau dana itu berkurang, jumlah upah yang diterima pekerja/buruh pun akan berkurang.

d. Teori Upah Etika

Menurut teori ini, yang dipersoalkan sebenarnya bukanlah berapa besarnya upah yang diterima pekerja/buruh, melainkan sampai seberapa jauh upah tersebut mampu mencukupi segala kebutuhan hidup pekerja/buruh beserta keluarganya. Oleh karena itu, dianjurkan oleh teori ini bahwa untuk menunjang keperluan hidup buruh yang besar tanggungannya disediakan dana khusus oleh pengusaha atau negara yang disebut dana anak-anak.

2.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka

2.1.3.1 Definisi Tingkat Pengangguran Terbuka

Menurut Sukirno (2006) pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya. Berdasarkan pengertian tersebut, untuk dikatakan sebagai pengangguran seseorang tidak cukup tidak memiliki pekerjaan dan tidak bekerja tetapi harus aktif mencari pekerjaan

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja mencakup penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau memiliki pekerjaan, namun sementara tidak bekerja, serta pengangguran. Pengangguran terbuka meliputi orang yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja

Berikut merupakan formulasi perhitungan tingkat pengangguran terbuka yang dilakukan oleh BPS:

$$\text{TPT} = \frac{\text{Jumlah pengangguran}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100\%$$

Keterangan:

TPT : Tingkat pengangguran terbuka
 Jumlah Pengangguran : Angkatan kerja yang tidak bekerja
 Angkatan Kerja : Pekerja dan pengangguran

2.1.3.2 Faktor penyebab pengangguran

Faktor- faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran (Sukirno, 2006) antara lain:

1. Besarnya angkatan kerja tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Hal ini terjadi saat jumlah angkatan kerja lebih besar daripada kesempatan kerja yang tersedia.
2. Struktur lapangan kerja tidak seimbang.

3. Kebutuhan jumlah dan jenis tenaga kerja terdidik dan penyediaan tenaga kerja terdidik tidak seimbang.
4. Meningkatnya peranan dan aspirasi angkatan kerja wanita dalam seluruh struktur angkatan kerja Indonesia.
5. Penyediaan dan pemanfaatan tenaga kerja antar daerah tidak seimbang

2.1.3.3 Teori Pengangguran

Beberapa teori yang menjelaskan pengangguran di Indonesia yaitu:

1. Teori Klasik

Teori Klasik menjelaskan pandangan bahwa pengangguran dapat dicegah melalui sisi penawaran dan mekanisme harga dipasar bebas supaya menjamin terciptanya permintaan yang akan menyerap semua penawaran. Menurut pandangan klasik, pengangguran terjadi karena mis-alokasi sumber daya yang bersifat sementara karena kemudian dapat diatasi dengan mekanisme harga

2. Teori Keynes

Dalam menanggapi masalah pengangguran Teori Keynes mengatakan hal yang berlawanan dengan Teori Klasik, menurut Teori Keynes sesungguhnya masalah pengangguran terjadi akibat permintaan agregat yang rendah. Sehingga terhambatnya pertumbuhan ekonomi bukan disebabkan oleh rendahnya produksi akan tetapi rendahnya konsumsi. Menurut Keynes, hal ini tidak dapat dilimpahkan ke mekanisme pasar bebas. Ketika tenaga kerja meningkat, upah akan turun hal ini akan merugikan bukan menguntungkan, karena penurunan upah berarti menurunkan daya beli masyarakat terhadap barang-barang.

Akhirnya produsen akan mengalami kerugian dan tidak dapat menyerap tenaga kerja.

2.1.3.4 Jenis-Jenis Pengangguran

Jenis pengangguran menurut sadono sukirno (2008:328) terbagi menjadi dua golongan:

1. Berdasarkan Penyebabnya pengangguran terbagi menjadi:

- a. Pengangguran Friksional, adalah pengangguran normal yang terjadi jika ada 2-3% maka dianggap sudah mencapai kesempatan kerja penuh.
- b. Pengangguran Siklikal, adalah pengangguran yang terjadi karena merosotnya harga komoditas dari naik turunnya siklus ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah dari pada penawaran tenaga kerja.
- c. Pengangguran Struktural, adalah pengangguran karena kemerosotan beberapa faktor produksi sehingga kegiatan produksi menurun dan pekerja diberhentikan.
- d. Pengangguran Teknologi, adalah pengangguran yang terjadi karena tenaga manusia digantikan oleh mesin industri.

2. Berdasarkan cirinya pengangguran terbagi menjadi:

- a. Pengangguran Musiman, adalah keadaan seseorang menganggur karena adanya fluktuasi kegiatan ekonomi jangka pendek. Sebagai contoh, petani yang menanti musim tanam, tukang jualan durian yang menanti musim durian, dan sebagainya.

- b. Pengangguran Terbuka, pengangguran yang terjadi karena pertambahan lapangan kerja lebih rendah daripada pertambahan pencari kerja.
- c. Pengangguran Tersembunyi, pengangguran yang terjadi karena jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi lebih besar dari yang sebenarnya diperlukan agar dapat melakukan kegiatannya dengan efisien.
- d. Setengah Menganggur, yang termasuk golongan ini adalah pekerja yang jam kerjanya dibawah jam kerja normal (hanya 1- 4 jam sehari). Disebut Underemployment

2.1.4 Investasi

Teori ekonomi mengartikan atau mendefinisikan investasi sebagai pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa yang akan datang. Dengan perkataan lain, investasi berarti kegiatan perbelanjaan untuk meningkatkan kapasitas produksi sesuatu perekonomian (Khakim, 2022)

2.1.4.1 Definisi Investasi Penanaman Modal dalam Negeri

Dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 1970 tentang penanaman modal dalam negeri (PMDN), disebutkan terlebih dahulu definisi modal dalam negeri pada pasal 1, yaitu sebagai berikut:

Undang-undang ini dengan ”modal dalam negeri” adalah: bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki

negara maupun swasta asing yang berdomisili di Indonesia yang disisihkan atau disediakan guna menjalankan suatu usaha sepanjang modal tersebut tidak diatur oleh ketentuan-ketentuan pasal 2 UU No.12 tahun 1970 tentang penanaman modal asing.

Pihak swasta yang memiliki modal dalam negeri tersebut dalam ayat 1 pasal ini tidak dapat terdiri atas perorangan dan/ atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Kemudian dalam pasal 2 disebutkan bahwa, yang dimaksud dalam Undang-Undang ini dengan “Penanaman modal dalam negeri” ialah penggunaan daripada kekayaan seperti tersebut dalam pasal 1, baik secara langsung untuk menjalankan usaha menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang ini.

Penanaman modal dalam negeri atau investasi dalam negeri merupakan modal negeri yang dimaknai sebagai sumber produktif dalam masyarakat yang dapat digunakan untuk pembangunan ekonomi dan merupakan bagian dari kekayaan masyarakat termasuk hak-hak, benda-benda (bergerak, tidak bergerak) yang dapat disisihkan untuk menjalankan suatu usaha

Berdasarkan Undang-undang No.25 tahun 2007 tentang penanaman modal, penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri

2.1.4.2 Manfaat Penanaman Modal dalam Negeri

Menurut Asiyon (2013) ada beberapa manfaat dari adanya penanaman modal dalam dalam negeri, yaitu:

1. Dapat menghemat devisa
2. Mengurangi ketergantungan terhadap produk asing
3. Adanya dorongan di bidang industri dalam negeri melalui keterkaitan ke depan maupun keterkaitan ke belakang
4. Memberikan kontribusi dalam upaya penyerapan tenaga kerja

2.1.4.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi PMDN

Menurut Rowland (2014), terdapat lima faktor yang mempengaruhi jumlah realisasi penanaman modal dalam negeri, antara lain:

1. Potensi dan karakteristik suatu daerah
2. Budaya masyarakat
3. Pemanfaatan era otonomi daerah secara proporsional
4. Peta politik daerah dan nasional
5. Kecermatan pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan lokal dan peraturan daerah yang menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia bisnis dan investasi

2.1.4.4 Teori Investasi

1. Teori Neo Klasik

Menekankan pentingnya tabungan sebagai sumber investasi. Investasi dipandang sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan

pembangunan. Makin cepat perkembangan investasi ketimbang laju pertumbuhan penduduk, makin cepat perkembangan volume stok kapital rata-rata per tenaga kerja. Makin tinggi rasio kapital per tenaga kerja cenderung makin tinggi kapasitas produksi per tenaga kerja. Tokoh Neo Klasik, Sollow dan Swan memusatkan perhatiannya pada bagaimana pertumbuhan penduduk, akumulasi capital, kemajuan teknologi dan output saling berinteraksi dalam proses pertumbuhan ekonomi (Arsyad 2010).

2. Teori Harrod-Domar

Menurut Jhingan (2003: 229), Harrod dan Domar memberikan peranan kunci kepada investasi di dalam proses pertumbuhan ekonomi. Pertama menciptakan pendapatan sebagai dampak permintaan, dan memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stok modal sebagai dampak penawaran. Karena itu, selama investasi tetap berlangsung, pendapatan nyata dan output akan senantiasa membesar

2.1.5 Sanitasi

2.1.5.1 Definisi Sanitasi

Sanitasi dalam bahasa Inggris berasal dari kata *sanitation* yang memiliki arti penjagaan kesehatan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), sanitasi didefinisikan sebagai usaha untuk membina dan menciptakan suatu keadaan yang baik di bidang kesehatan, terutama kesehatan masyarakat. Menurut WHO (World Health Organization) sanitasi ialah upaya pengawasan berbagai faktor lingkungan fisik yang memberi pengaruh terhadap manusia khususnya pada beberapa hal yang

memberi pengaruh pada efek, merusak perkembangan kesehatan, fisik, atau kelangsungan hidup.

Notoatmodjo 2015 dalam (Hiskia et al., 2021) memaparkan bahwa sanitasi adalah tingkah laku yang secara sengaja dilakukan untuk membudayakan hidup bersih yang tujuannya mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran atau limbah berbahaya yang lain, harapannya upaya ini akan menjaga serta memaksimalkan kesehatan manusia.

Cara mengukur presentase sanitasi layak:

$$PLSL = \frac{JRTSL}{JRTS} \times 100\%$$

Keterangan:

PLSL : Presentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan

JRTSL : Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap fasilitas sanitasi layak

JRTS : Jumlah rumah tangga seluruhnya

2.1.5.2 Teori Sanitasi Layak

Kesehatan adalah hak dasar bagi setiap manusia dan menjadi salah satu elemen hidup sejahtera. Definisi kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 merupakan kondisi sehat secara jasmani, mental, rohani, dan sosial yang diperlukan tiap individu untuk menjalankan kehidupan yang berguna dalam hal sosial dan ekonomi. Kondisi ekonomi dipengaruhi oleh kesehatan, kesehatan berperan penting dalam produktivitas manusia (Lasso, 2023). Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang baik dan menurunkan tingkat kemiskinan, dapat dilakukan melalui peningkatan modal manusia (*human capital*). Dalam istilah

ekonomi, kata “modal manusia” sering digunakan untuk merujuk pada bidang-bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan berbagai kapasitas individu lainnya, yang bila dikembangkan dapat meningkatkan produktivitas (Hatta & Azis, 2017). Romer (1999) menyatakan bahwa human capital merupakan pendorong utama produktivitas ekonomi dan investasi yang dilakukan manusia untuk menjadi lebih produktif (Nurkholis, 2016). Menurut Todaro (2000), kesehatan dan pendidikan dapat digunakan untuk mengukur modal manusia. Pendidikan dan kesehatan adalah tujuan pembangunan yang mendasar. Pendidikan dan kesehatan sangat penting berkenaan dengan gagasan yang lebih umum tentang peningkatan kemampuan manusia sebagai esensi pembangunan yang sebenarnya.

Fasilitas kesehatan dan akses sanitasi yang baik menjadi pendukung penting dalam mencapai derajat kesehatan yang tinggi (Adhitya et al., 2022). Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa fasilitas sanitasi layak merupakan fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, dimana fasilitas tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu, dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa, serta tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Menurut (Arsyad, 2010) intervensi pemerintah dalam memperbaiki juga merupakan instrumen penting untuk mengentaskan kemiskinan. Perbaikan kesehatan akan meningkatkan produktivitas golongan miskin karena kesehatan yang lebih baik akan meningkatkan kinerja kerja, mengurangi hari sakit, dan meningkatkan energi.

2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, berikut hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah yang akan diteliti:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti, Tahun dan Judul	Persamaan Variabel	Perbedaan Variabel	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Yulia Adella Sari (2021). Pengaruh Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah	Independen: -Upah minimum -Tingkat pengangguran terbuka Dependen: -Tingkat kemiskinan	-Jumlah penduduk	Upah minimum berpengaruh negatif, tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan	Jurnal Equilibrium Volume 10. No. 2. Tahun 2021 eISSN 2684-9313 Hal 121 - 130 pISSN 2088-7485
2	Thalita Luqiana Putri (2024). Analisis Pengaruh Pengangguran, Penanaman Modal dalam Negeri, dan Upah Minimum Provinsi terhadap Kemiskinan di Jawa Timur	Independen: -Pengangguran -PMDN -Upah minimum Dependen: -Kemiskinan		Pengangguran bermgaruh positif signifikan, sedangkan PMDN dan UMP berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan	Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi (JRPE) e-ISSN: 2540-9247. Volume: 9, Nomor: 1
3	Bagus Adhitya, Agus Prabawa, Heris Kencana (2022). Analisis Pengaruh Pendidikan, Kesehatan, Sanitasi dan Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga Per Rumah Tangga terhadap Kemiskinan di Indonesia	Independen: -Sanitasi -Kemiskinan Dependen: -Kemiskinan	- Pendidikan -Kesehatan -Rata-rata jumlah anggota keluarga	Pendidikan dan sanitasi berpengaruh negatif signifikan, kesehatan dan rata-rata jumlah anggota keluarga tidak signifikan terhadap kemiskinan	Ekonomis: Journal of Economics and Business, 6(1), Maret 2022, 288-295 ISSN 2597-8829 (Online), DOI 10.33087/ekonomis.v6i1.501
4	Syifa Putri Nur Azizah, Liliani Sumarni Pratiwi, Ima Amaliah,	Independen: -Sanitasi Dependen: -Kemiskinan	- Kepadatan penduduk	Kepadatan penduduk dan sanitasi secara parsial memiliki pengaruh negatif	JURNAL NUANSA AKADEMIKJurnal PembangunanM

	Freska Fitriyana, 2022. Sanitasi Dan Kepadatan Penduduk Sebagai Dinamika Kemiskinan Kota: Studi Kasus Provinsi Jawa Barat			dan signifikan, kemudian secara simultan kepadatan penduduk dan sanitasi signifikan terhadap kemiskinan	asyarakat(p)ISS N: 1858-2826; (e)ISSN:2747-0954Vol. 7No. 1, Juni 2022, p. 55-70
5	Deby Oktaviana, Wiwin Priatna P, Mohhamad Wahed, 2021. Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum , dan pengangguran terhadap kemiskinan di Kabupaten Madiun	Independen: -Upah minimum -Pengangguran Dependen: -Kemiskinan	- Pertumbuh an ekonomi	Pertumbuhan ekonomi dan upah minimum berpengaruh negatif signifikan sedangkan pengangguran berpengaruh tidak signifikan terhadap kemiskinan	Ridwan Institute https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v3i5.1183
6	Deris Desmawan, Adinda Kanza S, Lia Amalia, Raffy A, Rahma sasi kirana, Valentina, 2023. Analisis Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Banten	Independen: -Upah minimum Dependen: -Tingkat Kemiskinan	-Tingkat partisipasi masyarakat	Upah bminimum tidak berpengaruh signifikan dan tingkat pasritisipasi angkatan kerja berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan	Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI) Vol.3, No.2 April 2023 Page 649-657 E-ISSN: 2774-4221
7	Tessa Michelle Derek, Agnes L. Ch. P. Lopian, Steeva Y.L Tumangkeng ,2023. Pengaruh Pengangguran Terbuka, Pengeluaran Pemerintah, Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Kemiskinan di Sulawesi Utara	Independen: -Pengangguran Dependen: -Kemiskinan	- Pengeluara n pemerintah -Indeks pembangu nan manusia	Pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Pengeluaran Pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan	Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 23 No. 9 Oktober 2023
8	Titin Agustin Nengsih, Nania Saqina, Nimatul Maula, Fareza Aldi Oktavia, 2024. Analisis Pengaruh Tingkat	Independen: -Tingkat pengangguran terbuka Dependen: -Kemiskinan	-Indeks pembangu nan manusia	Tingkat pengangguran terbuka (TPT) berpengaruh positif signifikan dan indeks pembangunan	Jurnal PETA e- ISSN 2528-2581 Vol. 7 No.1 Januari Hal 147-161

	Pengangguran Terbuka (Tpt) Dan Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jambi			manusia (IPM) berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan	
9	Afa Nisa Maulani, Rusdarti, Agus Wahyudin, 2023. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Belanja Publik Terhadap Kemiskinan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai Variabel Moderasi di Jawa Tengah	Independen: -Tingkat pengangguran terbuka Dependen: -Kemiskinan	-Indeks pembangunan manusia	Pertumbuhan ekonomi, investasi, belanja publik secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan	BEAJ Vol 3 (2) (Nov) (2023): 65-74 BEAJ Business and Economic Analysis Journal http://beaj/unnes.ac.id DOI: http://dx.doi.org/10.15294/beaj.v3i2.46387
10	Yulita Sutikno, Debby Ch. Rotinsulu, Steeva Y. L.aTumangkeng, 2019. Pengaruh Upah Minimum Dan Investasi terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Utara	Independen: -Upah minimum -Invsetasi Dependen: -Kemiskinan		Upah minimum berpengaruh positif signifikan dan investasi berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan	Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 19 No. 01 Tahun 2019
11	Andri Adi Pratama, Indi Laila Lathifah, Deris Desmawan, 2022. Pengaruh Tingkat Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (Pmdn) Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Banten Tahun 2011-2021	Independen: -Investasi PMDN Dependen: -Kemiskinan		PMDN berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.	Ebismen Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen Vol.1, No.2 Juni 2022 e-ISSN: 2962-7621; p-ISSN: 2962-763X, Hal 179-188
12	Andika Fitriana, Evi Gravitiyani, 2022. Analisis pengaruh desentralisasi fiskal, indeks Pembangunan manusia, pendapatan per kapita dan akses	Independen: -Sanitasi layak Dependen: -Kemiskinan	- Desentralisasi fiskal -IPM - Pendapatan per kapita	Belanja modal positif signifikan, IPM negatif signifikan, pendapatan perkapita negatif signifikan sedangkan sanitasi layak negatif tidak	Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan P-ISSN 1412 – 2200 E-ISSN 2548 – 1851 Vol. 22 No. 1, Maret, 2022, Page 44-56

	sanitasi layak terhadap kemiskinan			signifikan terhadap kemiskinan	
13	Ema Dian Ristika, Wiwin Priana Primandhana, dan Mohammad Wahed, 2021. Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur	Independen: -Tingkat pengangguran terbuka Dependen -Kemiskinan	-Jumlah penduduk -Indeks pembangunan manusia	jumlah penduduk berpengaruh signifikan, tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh signifikan, indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan	Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, 12(2), November 2021, 129-136 Fakultas Ekonomi, Universitas Batanghari Jambi ISSN 2580-6882 (Online), ISSN 2087-5304 (Print), DOI 10.33087/eksis.v12i2.254
14	Maryam Batubara, Luthfiah Nazmi, Miftah Rizki Addin Harahap, 2023. Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Aceh	Independen: -Tingkat pengangguran terbuka Dependen: -Kemiskinan	-Indeks pembangunan manusia	Tingkat pengangguran terbuka (TPT) berpengaruh positif signifikan dan Indeks pembangunan Manusia (IPM) negatif signifikan terhadap kemiskinan	Jurnal Masharif al-Syariah: Ekonomi dan Perbankan Syariah ISSN: 2527 - 6344 (Printed), ISSN: 2580 - 5800 (Online) Accredited No. 30/E/KPT/2019 DOI: http://dx.doi.org/10.30651/jms.v8i2.19915 Volume 8, No. 2, 2023 (1418-1428)
15	Khairil Ihsan, Ikhsan, S.E, M.A, 2018. Analisis Pengaruh Ump, Inflasi Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh	Independen: -UMP -Tingkat pengangguran Dependen: -Kemiskinan	-Inflasi	Upah minimum positif signifikan, inflasi positif tidak signifikan, jumlah pengangguran negatif signifikan terhadap kemiskinan	Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) ISSN.2549-8363 Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah Vol. 3 No. 3 Agustus 2018 : 408-419

2.3 Kerangka Pemikiran

2.3.1 Hubungan Upah Minimum terhadap Kemiskinan

Menurut Todaro & Smith (2014), adanya penetapan upah minimum bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut teori Nurkse dalam (Salsabilla et al., 2022) upah yang rendah akan mempengaruhi kemampuan untuk menabung. Tidak adanya tabungan masyarakat miskin akan sulit untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sehingga akan menyebabkan kemiskinan. Menurut Kaufman (2000) dalam (Islami & Anis, 2019) tujuan utama ditetapkan upah minimum adalah memenuhi standar hidup minimum. Upah minimum adalah usaha untuk mengangkat derajat masyarakat yang memiliki pendapatan rendah, terutama pekerja miskin. Semakin meningkat tingkat upah minimum maka akan meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga kesejahteraan juga meningkat.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari et al., (2021) yang menyatakan bahwa upah minimum berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Diperkuat lagi dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Deby Oktaviana (2021) dan hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri & Hutabarat (2024) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara upah minimum dengan kemiskinan yang artinya semakin tingginya upah minimum maka akan semakin tinggi pula pendapatan masyarakat sehingga berpengaruh pada kesejahteraan yang meningkat dan pada akhirnya terbebas dari kemiskinan.

2.3.2 Hubungan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Kemiskinan

Menurut Sukirno (2004) dalam jurnal (Firman & Sri, 2022) efek buruk dari pengangguran ini dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan

masyarakat akan menurun akibat dari pengangguran. Hal tersebut dapat meningkatkan peluang masyarakat untuk menjadi miskin karena kurangnya pendapatan yang diperoleh. Apabila pengangguran di suatu negara sangat buruk, kekacauan politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk bagi kepada kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Oleh sebab itu, pengangguran memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan tingkat kemiskinan. Dengan kata lain, jika pengangguran di wilayah tersebut meningkat, maka dapat menyebabkan peningkatan kemiskinan di suatu daerah tersebut.

Hal ini sesuai dengan penelitian Derek et al., (2023), bahwa tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Diperkuat lagi dengan penelitian yang dilakukan oleh Maryam (2023) dan hasil penelitian yang dilakukan oleh Suktikno (2019) yang menunjukkan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Semakin meningkat pengangguran maka akan semakin tidak produktif penduduknya, sehingga penduduk tidak akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan kebutuhan hidup yang semakin tidak terpenuhi akan meningkatkan kemiskinan yang ada.

2.3.3 Hubungan Investasi terhadap Kemiskinan

Menurut Sukirno (2006) kegiatan untuk terus meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat yaitu dengan melakukan investasi, investasi akan meningkatkan kegiatan perekonomian dan kesempatan kerja sehingga akan meningkatkan pendapatan nasional dan akan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Menurut Sukirno (2000) dalam jurnal (Mario Nicolas Munthe, 2021) kegiatan investasi atau penanaman modal yang terus dilakukan oleh masyarakat dapat meningkatkan kesempatan kerja, pendapatan nasional, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Investasi memiliki pengaruh yang besar terhadap kemiskinan yang ada pada suatu wilayah karena dengan banyaknya investasi dari investor melalui pengembangan usaha-usaha baik berskala makro ataupun mikro, tentunya akan membutuhkan tenaga kerja untuk mengembangkan usahanya tersebut, sehingga secara tidak langsung dapat menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat. Hal tersebut akan berdampak terhadap pengurangan jumlah penduduk miskin, karena masyarakat telah memiliki pekerjaan akan mendapatkan pendapatan.

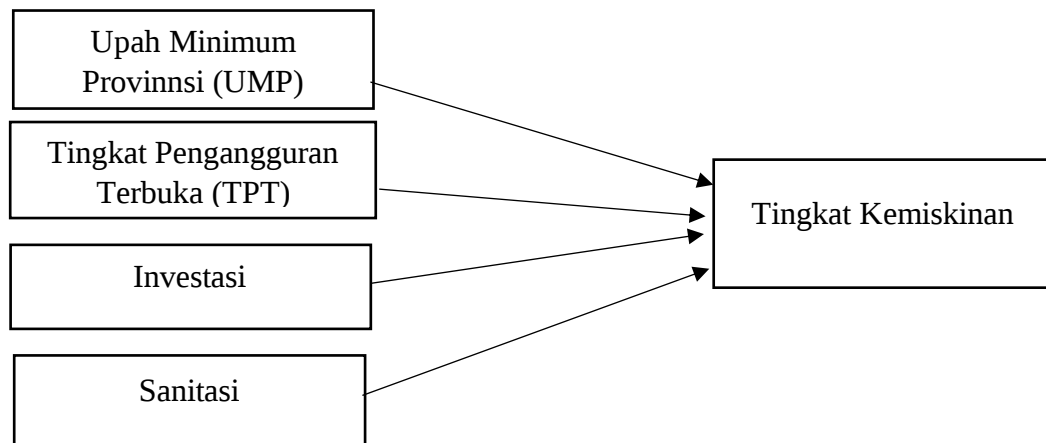
Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Maulani Nisa et al., (2023) bahwa investasi berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Diperkuat lagi dengan penelitian Putri & Hutabarat (2024) dan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sutikno et al., (2019) menunjukkan bahwa investasi memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Artinya, dengan meningkatnya investasi menunjukkan adanya pengaruh terhadap kemiskinan dikarenakan peningkatan investasi dapat menciptakan permintaan baru sehingga mendorong produksi dan menciptakan lapangan kerja, dengan terbukanya lapangan kerja masyarakat dapat meningkatkan pendapatan mereka sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan.

2.3.4 Hubungan Sanitasi terhadap Kemiskinan

Berdasarkan teori lingkaran perangkap kemiskinan, penyebab kemiskinan salah satunya yaitu adanya tingkat produktivitas rendah dan menurut Todaro & Smith (2011) dalam (Fahmi & Hayati, 2024) peningkatan produktivitas dapat melalui peningkatan kesehatan. Kesehatan merupakan pilar utama dalam memperkuat modal manusia, semakin sehat seseorang atau semakin tinggi akan kesadaran hat manusia maka semakin tinggi angka harapan hidup manusia atau dapat memperpanjang usia harapan hidup manusia (Hasanah et al., 2021). Dimana semakin tinggi kesehatan yang dimiliki masyarakat maka angka harapan hidup dan kesempatan memperoleh pendapatan akan meningkat, sehingga akhirnya akan berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan (Nur Azizah et al., 2022)

Kesehatan merupakan suatu investasi dalam meningkatkan dan juga memperbaiki produktivitas serta kualitas sumber daya manusia sekaligus untuk menjadikan taraf kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Adanya derajat kesehatan yang baik dan juga memadai tentu harus ditunjang dengan fasilitas kesehatan serta akses sanitasi yang baik dan juga layak, dikarenakan sanitasi berhubungan dengan lingkungan yang akan berpengaruh terhadap kesehatan. Terutama sanitasi di lingkungan rumah tangga yang meliputi penyediaan air bersih, jamban sehat, pengelolaan sampah dan saluran pembuangan air limbah (Adhitya et al., 2022). Mungkasa (2004) juga menyatakan bahwa peningkatan kualitas dan ketersediaan air minum dan sanitasi dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk yang berarti mengurangi tingkat kemiskinan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Adhitya (2022) bahwa sanitasi berpegaruh negatif signifikan

terhadap terhadap kemiskinan. Diperkuat dengan hasil penelitian Nur Azizah (2022) yang hasilnya menunjukkan sanitasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara pada rumusan penelitian, yang dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat serta pernyataan yang dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan hanyalah didasarkan kepada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang telah diperoleh melalui pengumpulan data. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diduga secara parsial upah minimum provinsi, investasi dan sanitasi mempunyai pengaruh negatif sedangkan tingkat pengangguran terbuka mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Jawa tahun 2015-2023

2. Diduga secara bersama-sama, upah minimum provinsi, tingkat pengangguran terbuka, investasi dan sanitasi mempunyai pengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Jawa tahun 2015-2023.